



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



**PERDA KAB. MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2019 - 2024**

Kota Mungkid, 8 November 2022

**RUANG LINGKUP
PERUBAHAN RPJMD
KAB. MAGELANG TH. 2019 - 2024**



LATAR BELAKANG PERUBAHAN RPJMD

• Keselarasan dengan Prioritas Nasional dengan diterbitkannya Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Dinamika Peraturan Perundangan yang mempengaruhi substansi RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya

• Memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD utamanya pada capaian target indikator kinerja

Kondisi Lingkungan Strategis Khususnya Dampak Pandemi Covid 19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyesuaian arah kebijakan, strategi, prioritas dan sasaran pembangunan daerah

RESIKO APABILA TIDAK DILAKUKAN PERUBAHAN RPJMD

1. Tidak dapat menyusun APBD, karena belum mendasarkan :
 - PP 12 Tahun 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Permendagri No. 90 Tahun 2019 ttg Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Target-target tidak akan tercapai karena kondisi pandemi Covid-19
3. Tidak selaras dengan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023



Perubahan RPJMD dilakukan apabila : (Pasal 342 Permendagri 86/2017)



1 Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai ketentuan Permendagri 86 /2017

2 Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri 86 /2017

3 Terjadi perubahan yang mendasar diantaranya:

☐ **Bencana alam**

☐ **Goncangan politik**

☐ **Krisis Ekonomi**

☐ **Konflik Sosial Budaya**

☐ **Gangguan Keamanan**

☐ **Pemekaran Daerah**

☐ **Atau perubahan kebijakan nasional**

Tidak dapat dilakukan apabila : Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 tahun

PERUBAHAN RPJMD

KAB. MAGELANG TH. 2019 - 2024





Landasan Hukum

01

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

02

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

03

PP No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM)

04

PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

05

PERPRES No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

06

PERPRES No. 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobongan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Pemalang-Tegal

07

PERPRES No. 109 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

08

Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perkembangan Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

09

Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

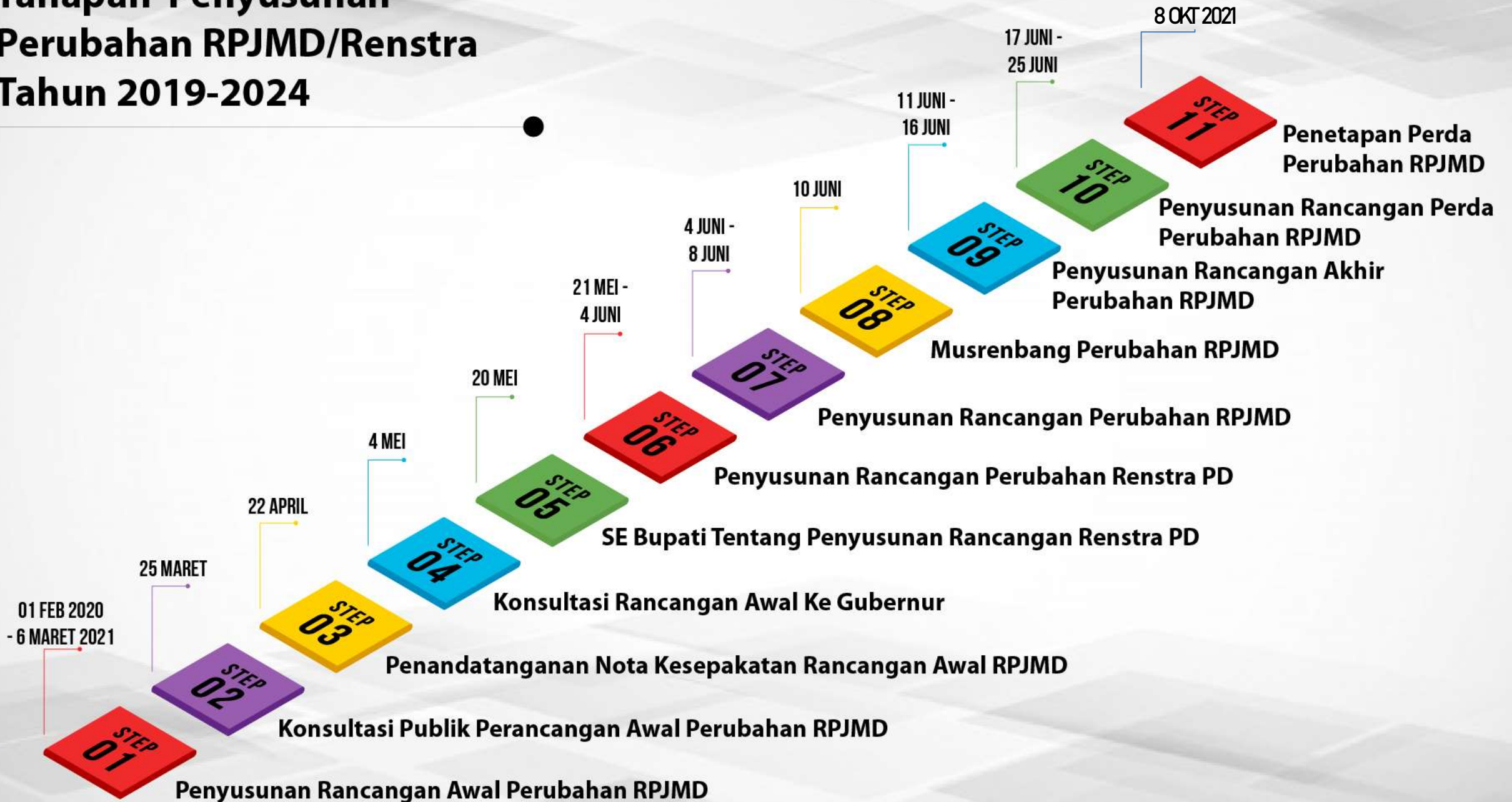
10

Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

11

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tahapan Penyusunan Perubahan RPJMD/Renstra Tahun 2019-2024



RPJMD

***KAB. MAGELANG
TAHUN 2019- 2024***

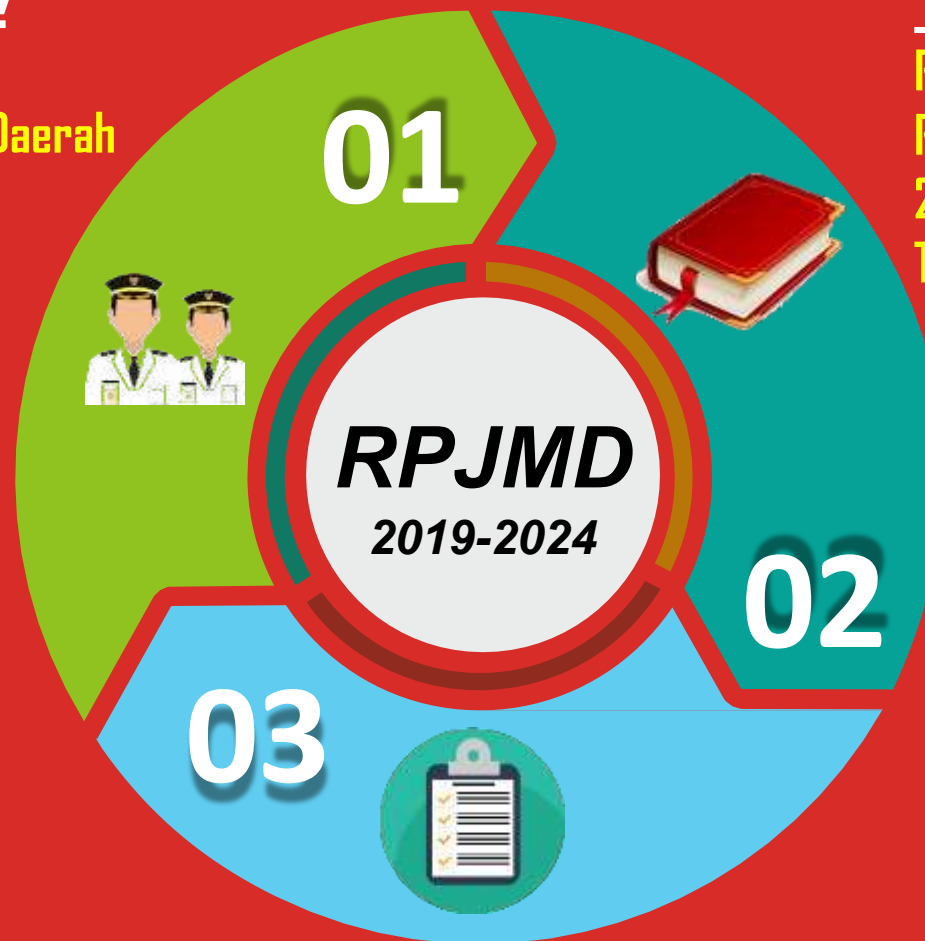


Penjabaran

Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah

Berpedoman

RPJPD Th. 2005-2025,
RPJMD Prov. Jateng Th.
2018-2023 dan RPJMN
Th. 2014-2019



Memuat

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah

Indeks Pembangunan Manusia



CAPAIAN 2020 : 69,87
JAWA TENGAH : 71,87
NASIONAL : 71,92

IPM				
2016	2017	2018	2019	2020
67,85	68,39	69,11	69,87	69,87

Capaian Komponen IPM 2020 :

Angka Harapan Hidup
73,72 Tahun
(2019: 73,56)



Harapan Lama Sekolah
12,54 Tahun
(2019 : 12,53)



Rata-Rata Lama Sekolah
7,78 Tahun
(2019 : 7,77)

Pengeluaran Perkapita
Disesuaikan
Rp. 9.301.000,-
(2019: 9.387.000,-)



KONDISI MAKRO

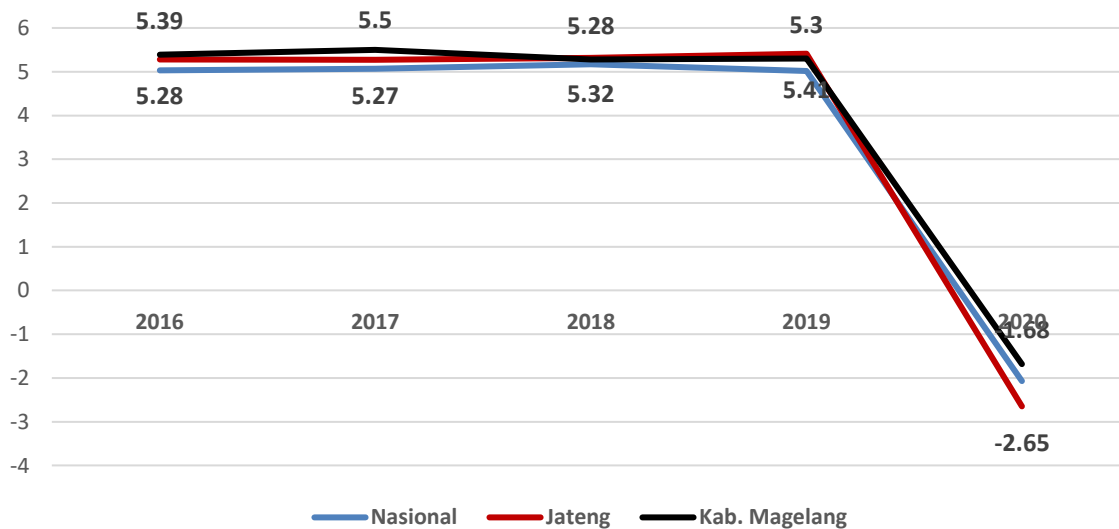
Laju Pertumbuhan Ekonomi



CAPAIAN 2020 : -1,68%
JAWA TENGAH : -2,65%
NASIONAL : -2,07%

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2016	2017	2018	2019	2020
5,39	5,50	5,28	5,30	-1,68



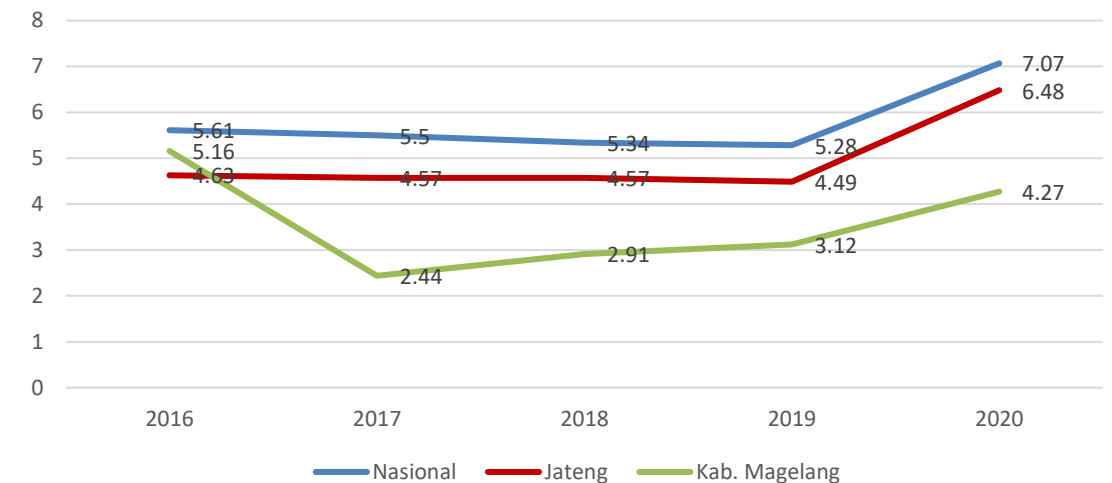
KONDISI MAKRO

Tingkat Pengangguran Terbuka

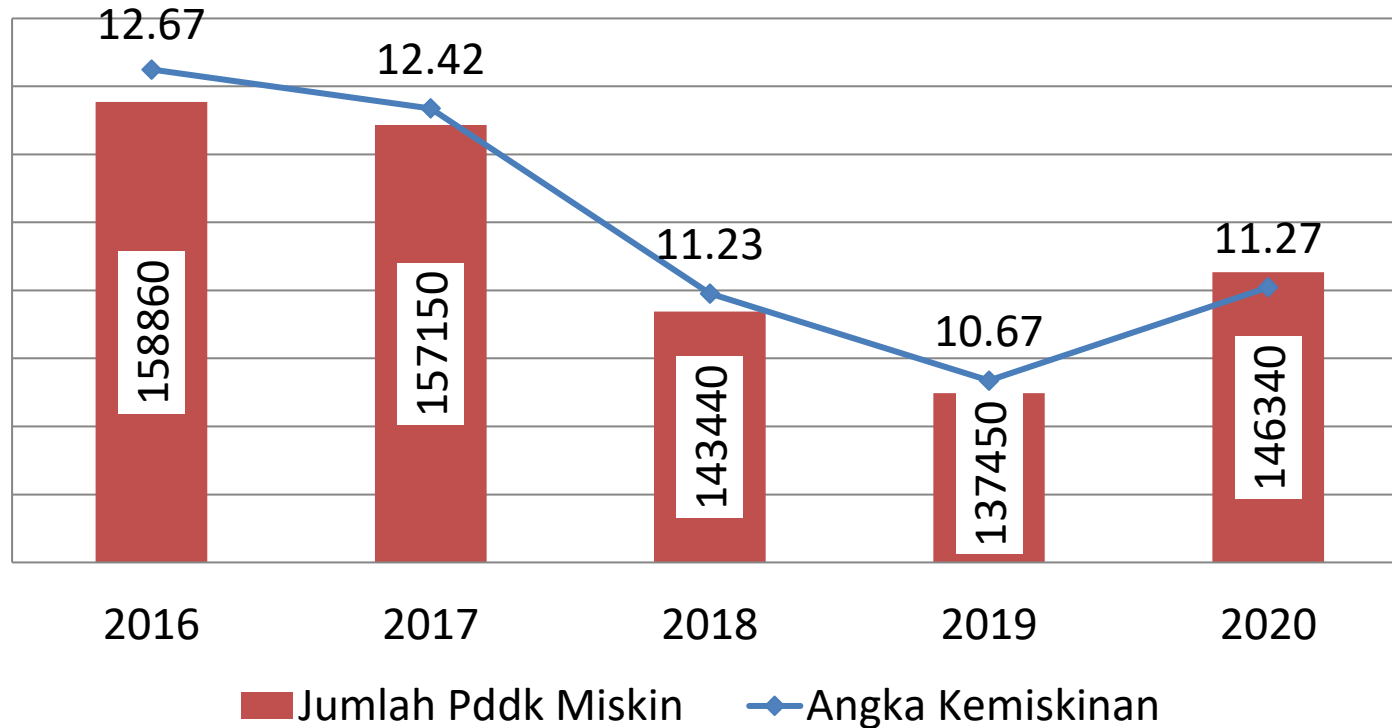
CAPAIAN 2020 : 4,27%
JAWA TENGAH : 6,48%
NASIONAL : 7,07%

Tingkat Pengangguran Terbuka

2015	2017	2018	2019	2020
5,16	2,44	2,91	3,12	4,27



PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016-2020



Sumber

(Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2020, diolah)

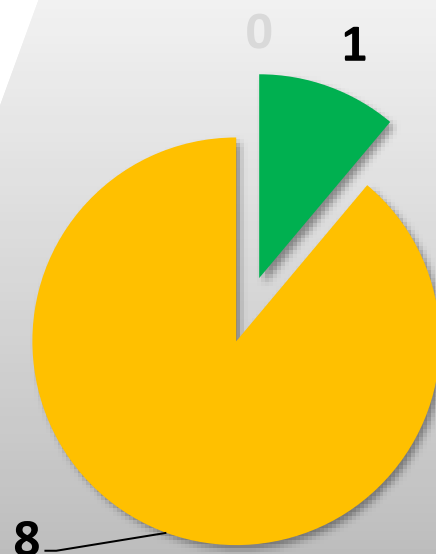


CAPAIA 2020 : 11,27
JAWA TENGAH : 11,41
NASIONAL : 9,78

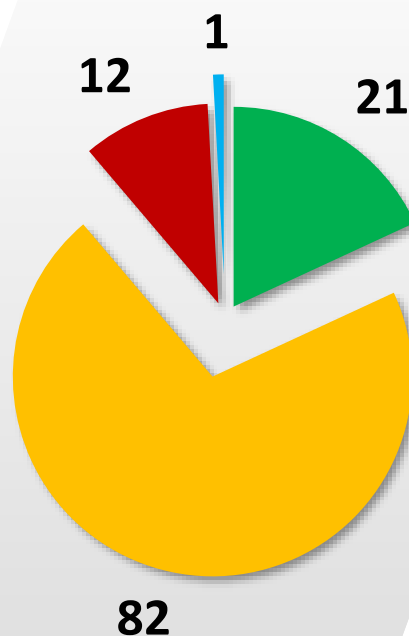
- **Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2020 sebesar 11,27 persen, naik 0,60 persen poin** dibandingkan periode maret 2019, sedangkan kenaikan kemiskinan Provinsi JawaTengah sebesar 0,61 persen.
- **Jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2020 sebesar 146.340 orang, bertambah 8.890 orang** dibanding periode Maret 2019, sedangkan kenaikan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 237.360 orang.
- **Walaupun secara umum mengalami kenaikan dengan adanya pandemi Covid-19, Pada periode Maret tahun 2020, capaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang masih lebih rendah** dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (11,41%), namun masih berada di atas capaian nasional (9,78 %).





EVALUASI KINERJA RPJMD KAB. MAGELANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

**9 Indikator Kinerja
Utama**

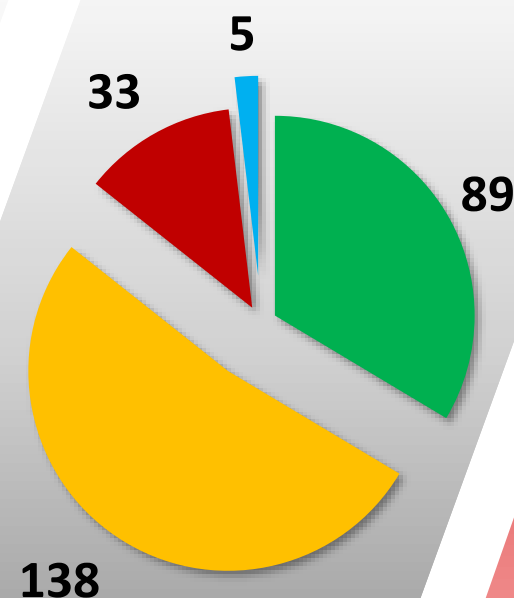


**116 Indikator Kinerja
Daerah**



Tercapai : 
Akan Tercapai 
Perlu Kerja Keras 
Blm ada data 

**265 Indikator Kinerja
Program**



PERMASALAHAN PEMBANGUNAN & ISU STRATEGIS

Permasalahan Pembangunan

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kinerja pembangunan pendidikan2. Kinerja pembangunan kesehatan3. PMKS4. Ketahanan pangan daerah5. Pengangguran6. Keberdayaan berbasis gender7. Kualitas lingkungan hidup8. Cakupan dan kualitas layanan infrastruktur | <ol style="list-style-type: none">9. Daya saing sosial ekonomi daerah10. Akuntabilitas kinerja pemerintahan11. Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi12. Pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah13. Kualitas pelayanan publik14. Sistem manajemen kepegawaian |
|---|---|

Isu Strategis

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kualitas Sumber Daya Manusia2. Daya Saing Daerah3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel |
|--|

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG yang SEJAHTERA, BERDAYA SAING dan AMANAH (SEDAYA AMANAH)



MISI 1

Meningkatkan Kualitas
Kehidupan Masyarakat
yang Sejahtera dan
Berakhlak Mulia



MISI 2

Meningkatkan Daya Saing
Daerah yang berbasis pada
potensi lokal dengan tetap
menjaga Kelestarian
Lingkungan Hidup



MISI 3

Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan yang
Amanah

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA

TUJUAN

SASARAN DAERAH

Meningkatnya
kualitas SDM

- a. Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan
- b. Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan

Meningkatnya paritas
daya beli masyarakat

- a. Menurunnya jumlah PMKS
- b. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
- c. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

Meningkatnya
pembangunan
berbasis gender

Meningkatnya keberdayaan gender

MISI 2 :

MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH YANG BERBASIS PADA POTENSI LOKAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

TUJUAN

Meningkatnya daya saing daerah

SASARAN DAERAH

- a. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah
- b. Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik
- c. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur

MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH

TUJUAN

Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
yang bersih dan
akuntabel

SASARAN DAERAH

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- c. Meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- e. Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian

Dasa Cita

CITA

1

KEHIDUPAN BERAGAMA DAN AKHLAK MULIA

"Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan akhlak mulia"



CITA

2

PENDIDIKAN

"Meningkatkan pemerataan pendidikan yang seluas-luasnya dan peningkatan mutu pendidikan"

CITA

3

KESEHATAN

"Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan terjangkau"



CITA

4

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

"Penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi"



CITA

5

PENGEMBANGAN PERTANIAN, PARIWISATA DAN UKM

"Pemanfaatan sektor unggulan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat"

Dasa Cita

CITA

6

SARANA DAN PRASARANA PUBLIK

"Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana publik"



CITA

7

LINGKUNGAN HIDUP

"Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat"



CITA

8

BIROKRASI DAN TATA PEMERINTAHAN

"Peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel"



CITA

9

KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

"Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan kesiapsiagaan menghadapi bencana"



CITA

10

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

"Peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berprestasi"

Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJMN Tahun 2020-2024

No	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024
	VISI	VISI
	Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)
	MISI	MISI
1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Misi 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	Misi 2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi 2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Misi 2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
6	Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	Misi 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia. Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Misi 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJMD Prov. Jawa Tengah

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Visi	Visi
Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya, Saing, dan Amanah
Misi	Misi
Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan berakhlak Mulia
Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah
Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan berakhlak Mulia
	Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup
Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan berakhlak Mulia
	Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD

No	RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024
VISI		
1	Kabupaten Magelang Yang Maju, Sejahtera dan Madani	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)
MISI		
1	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal	Misi 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
2	Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis	Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.
3	Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah	Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.
4	Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Misi 2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5	Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia	Misi 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
6	Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing	Misi 2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah

KEPMENDAGRI NOMOR 050.3708 TAHUN 2020

Tentang Pemutakhiran Permendagri 90/2019



- Penyesuaian nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan RPJMD 2019-2024 dan Perubahan Renstra PD 2019-2024
- Penyesuaian arsitektur perencanaan pembangunan pada indikator kinerja semula 4 level (tujuan, sasaran, program dan kegiatan) menjadi 5 level (tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan)



Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Integrasi Indikator Capaian SPM Untuk 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Di Dalam Dokumen RPJMD 2019-2024, adalah :

1) **Urusan Pendidikan**

3 (tiga) Indikator SPM bidang Pendidikan sudah terintegrasi di RPJMD Kab. Magelang tahun 2019-2024,

2) **Urusan Kesehatan :**

Indikator dari 12 jenis pelayanan dasar SPM urusan Kesehatan sudah diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kab. Magelang Tahun 2019-2024

3) **Urusan Pekerjaan Umum :**

Indikator SPM urusan Pekerjaan umum ada 2, dan kedua-duanya sudah diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD 2019-2024

4) **Urusan Perumahan Rakyat**

Indikator SPM urusan Perumahan Rakyat ada 2, dan kedua-duanya sudah diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD 2019-2024

5) **Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kelima Indikator capaian SPM bidang Trantibumlinmas sudah diintegrasikan menjadi indikator kinerja di dalam RPJMD tahun 2019-2024

6) **Urusan Sosial**

5 (lima) indikator capaian SPM urusan sosial sudah diintegrasikan dalam RPJMD 2019-2024 dengan nama yang agak berbeda, tetapi substansinya mencakup semua indikator capaian SPM social



Catatan :

Dengan diberlakukannya permendagri no 90 tahun 2019, indicator SPM Sebagian menjadi indicator Kegiatan/sub kegiatan dan diakomodir di Renstra PD

PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN STRUKTUR KERANGKA PENDANAAN SESUAI PP 12/2019 PADA RPJMD KAB. MAGELANG TAHUN 2019-2024

(PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA RPJMD INDUK TAHUN 2019-2024 MENGACU PP NO 58/2005)

URAIAN	PP 58 TAHUN 2005	PP 12 TAHUN 2019
Struktur Pendapatan Daerah dalam APBD	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) : (Pasal 22 ayat (1))</p> <ul style="list-style-type: none">-Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan-Lain-lain PAD yang Sah <p>Dana Perimbangan : (Pasal 23)</p> <ul style="list-style-type: none">- Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus <p>Lain-lain Pendapatan yang Sah: (Pasal 22 ayat (2))</p> <ul style="list-style-type: none">-Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otsus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) > (Pasal 31)</p> <ul style="list-style-type: none">- Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah <p>Pendapatan Transfer > (Pasal 34)</p> <ul style="list-style-type: none">- Transfer Pemerintah Pusat : Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa,- Transfer antar Daerah : Pendapatan Bagi hasil, Bantuan Keuangan <p>Lain-lain Pendapatan yang Sah > (Pasal 46)</p> <ul style="list-style-type: none">- Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Struktur Belanja Daerah dalam APBD	<p>Pasal 27 ayat (7)</p> <p>Belanja Tidak Langsung:</p> <ul style="list-style-type: none">-Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bansos, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga <p>Belanja Langsung:</p> <ul style="list-style-type: none">-Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal	<p>Pasal 55</p> <p>Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Belanja Operasi: pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemda yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bansosb. Belanja Modal : pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.c. Belanja Tidak Terduga: pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.d. Belanja Transfer: pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, terdiri atas: Belanja Bagi Hasil & Belanja Bantuan Keuangan

KESELARASAN RPJMD DENGAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

INTERNALISASI DALAM STRATEGI DAN INDIKATOR
KINERJA PADA PERUBAHAN RPJMD 2019-2024

**JUMLAH INDIKATOR TPB
KABUPATEN
MAGELANG SEBANYAK 209**

86 INDIKATOR SUDAH MENJADI INDIKATOR KINERJA
PADA RPJMD DAN ATAU RENSTRA PD TAHUN 2019-2024

123 INDIKATOR TPB DAPAT DITUANGKAN DALAM KONDISI CAPAIAN
ATAU GAMBARAN UMUM DAERAH SEBAGAI DATA DUKUNG DI BAB II
RPJMD

Prinsip pelaksanaan TPB yaitu *no one left behind* memberikan makna bahwa keterlibatan kelompok marginal (salah satunya disabilitas) adalah keikutsertaan/peran serta aktif dalam penyelenggaraan pembangunan, mendapatkan benefit pembangunan dan menjadi arus utama dalam kebijakan serta program pembangunan.

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

KEUANGAN DAERAH (Struktur APBD sesuai PP 12/2019)

Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Pendapatan Asli Daerah			
Sebelum Perubahan	457.078.936.481	489.074.462.034	523.309.674.377
Setelah Perubahan	352.421.620.890	424.421.620.890	483.840.647.815
Pajak Daerah	120.827.282.454	161.822.957.906	167.849.077.763
Retribusi Daerah	24.414.190.110	30.925.190.014	32.104.775.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	29.084.407.273	30.239.029.928	31.134.481.017
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	178.095.741.053	201.434.443.042	252.752.314.196
Pendapatan Transfer	1.973.979.387.469	1.992.768.919.469	2.006.650.274.469
Transfer Pemerintah Pusat	1.795.749.287.469	1.795.749.287.469	1.795.749.287.469
Transfer antar daerah	178.230.100.000	197.019.632.000	210.900.987.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	114.519.600.000	117.087.200.000	97.593.800.000
Jumlah Pendapatan Daerah			
Sebelum Perubahan	2.715.929.150.524	2.769.107.876.040	2.825.228.785.664
Setelah Perubahan	2.440.920.608.359	2.534.277.740.359	2.588.084.722.284

KEUANGAN DAERAH			
Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Belanja Operasi	1.520.599.080.644	1.618.026.436.403	1.754.981.854.007
Belanja Pegawai	1.129.295.669.248	1.168.771.256.248	1.223.419.883.711
Belanja Barang dan Jasa	273.215.388.196	236.005.756.955	337.805.947.096
Belanja Hibah	76.379.238.200	171.540.638.200	152.047.238.200
Belanja Bantuan Sosial	41.708.785.000	41.708.785.000	41.708.785.000
Belanja Modal	264.413.541.358	251.622.254.832	263.475.086.731
Belanja Tidak Terduga	102.188.159.514	8.650.000.000	8.650.000.000
Belanja Transfer	645.702.494.608	650.453.162.144	651.173.732.612
Belanja Bagi Hasil	14.745.647.256	19.496.314.792	20.216.885.260
Belanja Bantuan Keuangan	630.956.847.352	630.956.847.352	630.956.847.352
TOTAL BELANJA DAERAH			
Sebelum Perubahan	2.816.633.156.385	2.882.232.375.920	2.899.714.562.980
Setelah Perubahan	2.532.903.276.124	2.528.751.853.379	2.678.280.673.350
Surplus (defisit)			
Sebelum Perubahan	(100.704.005.861)	(113.124.499.880)	(74.485.777.316)
Setelah Perubahan	(91.982.667.765)	5.525.886.980	(90.195.951.066)

KEUANGAN DAERAH

Uraian	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
Pembiayaan Daerah	33.258.198.765	(5.525.886.980)	90.195.951.066
Penerimaan Pembiayaan	120.482.667.765	27.974.113.020	93.695.951.066
SiLPA	120.482.667.765	27.974.113.020	28.695.951.066
Pencairan Dana Cadangan		0	65.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	28.500.000.000	33.500.000.000	3.500.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	30.000.000.000	0
Penyertaan Modal	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

SEMULA

URUSAN	JUMLAH PROGRAM
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	23
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	36
Urusan Pilihan	14
Unsur Penunjang Pemerintahan	24
Pendukung Operasional OPD	2
Jumlah Semua Program	99



MENJADI

URUSAN	JUMLAH PROGRAM
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	29
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	57
Urusan Pilihan	21
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	5
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	7
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	2
Unsur Kewilayahan	3
Unsur Pemerintahan Umum	5
Program Penunjang Urusan Pemda	1
Jumlah Semua Program	130

Menyesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 90/2019
dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020



INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)		
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka (0 - 100)	69,58	69,58	69,83	70,25	70,09	70,33	70,57	69,87	70,64	71,03	71,42
2	Inflasi	persen	2,5-4,0	2,5-4,5	2,5-4,0	2,0-4,0	2,5-4,0	2,5-4,0	2,5-4,0	1,56	2,0-4,0	2,0-4,0	2,0-4,0
3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.400,64	9.401,64	9.762,42	9.443,22	9.900,38	10.262,16	10.400,12	9.301,00	9.587,62	9.734,22	9.883,06
4	Angka Kemiskinan	persen	9,43-10,43	13,90-12,80	8,78-9,78	12,44-11,52	8,13-9,13	7,48-8,48	6,83-7,83	11,27	11,27-10,52	10,67-9,92	10,07-9,32
5	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	93,21	93,21	93,31	91,91	93,81	94,11	94,41	91,81	92,40	92,70	92,99
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,1-5,6	1,7 - 2,9	5,2-5,7	3,3-4,3	5,3-5,8	5,4-5,9	5,5-6,0	-1,68	3,4-4,4	3,5-4,5	3,6-4,6
7	PDRB Per Kapita	juta rupiah	26,7	26,7	28,21	26,84	29,71	31,21	32,72	24,94	27,78	28,68	29,52
8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	69,93	69,93	72,98	72,16	76,42	79,83	83,29	66,60	71,91	74,76	82,21
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	persen	65,53	65,53	67,25	67,25	68,96	70,68	72,39	61,07 (Cukup Baik)	68,96 (Cukup Baik)	70,68 (Baik)	72,39 (Baik)

INDIKATOR SASARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

No	Indikator Sasaran Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)		
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,86	7,86	8	7,89	8,14	8,27	8,41	7,78	8,00	8,11	8,22
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,76	12,76	12,92	12,57	13,02	13,17	13,27	12,54	12,60	12,63	12,66
3	Presentase SD & SMP yang berakreditasi minimal B	persen	94,41	94,41	94,79	94,41	95,19	95,56	95,94	93,10	94,79	95,12	95,56
4	Angka Harapan Hidup	tahun	73,56	73,56	73,61	73,85	73,65	73,7	73,75	73,72	73,97	74,10	74,22
5	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	67,74	69,93	73,81	73,00	80,68	87,48	94,38	61,90	-	-	-
		persen	-	-	-	73,00	-	-	-	-	75,56	81,80	93,07
xx	Cakupan hunian layak dan berkualitas **)	persen	63,77	63,77	68,66	68,66	86,04	90,93	95,81	67,73	-	-	-
6	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	82,2	86,42	83,62	83,62	84,99	86,33	87,76	94,00	84,99	86,33	87,76
7	Indeks Pemberdayaan Gender	angka (0-100)	69,33	69,33	69,63	69,75	69,93	70,23	70,53	69,65	69,93	70,23	70,53
8	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,58	0,58	0,57	0,58	0,58	0,58	0,63	0,58	0,58	0,58
9	Kategori Kabupaten Layak Anak	-	nindya	nindya	nindya	nindya	nindya	nindya	utama	nindya	nindya	nindya	nindya
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	2,4-3,0	5,38-6,25	2,25-2,65	4,54-5,17	2,25-2,65	2,25-2,60	2,25-2,55	4,27	3,93-3,87	2,4-3,0	2,25-2,65
11	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	miliar rupiah	7.648,6	7.648,6	8.139,8	8.139,8	8.631	9.122,2	9.613,39	7.264,81	8.631	9.122,2	9.613,39

No	Indikator Sasaran Daerah	Satuan	Target Capaian (RPJMD Murni)							Realisasi Capaian (RPJMD Murni)	Target Capaian (RPJMD Perubahan)		
			2020	2020 *)	2021	2021 *)	2022	2023	2024		2020	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Indeks ketahanan pangan	angka (0-100)	78,42	78,42	79,47	79,47	80,52	81,57	82,62	81,27	81,30	81,57	82,62
13	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	miliar rupiah	7.373,16	7.373,16	7.748,63	7.748,63	8.124,10	8.499,56	8.875,03	6.914,81	8.124,10	8.499,56	8.875,03
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka (0-100)	72,12	72,12	72,14	71,32	72,16	72,18	72,2	71,30	71,34	71,36	71,38
15	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,68	0,68	0,69	0,69	0,7	0,71	0,72	0,68	0,7	0,71	0,72
16	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	2,31-2,50	2,31-2,50	2,51-2,61	2,51-2,61	2,62-2,72	2,73-2,85	2,86-3,1	2,94	3,0-3,20	3,21-3,40	3,41-3,60
17	Nilai PDRB sektor perdagangan	miliar rupiah	4.868,86	4.868,86	5.208,43	5.208,43	5.547,99	5.887,55	6.227,11	4.306,14	5.547,99	5.887,55	6.227,11
18	Nilai PDRB sektor pariwisata	miliar rupiah	1.523,19	1.523,19	1.630,14	1.630,14	1.737,10	1.844,05	1.951,00	1.274,04	1.737,10	1.844,05	1.951,00
19	Pertumbuhan Investasi	persen	5	5	5	5	5	5	5	13	10	10	10
20	Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	63,03 (B)	63,03 (B)	65,02 (B)	60,33 (B)	67,01 (B)	69,00 (B)	71,00 (BB)	60,33 (B)	61,04 (B)	63,03 (B)	65,02 (B)
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	83	83	83,75	83,75	84,5	85,25	86	83,69	84,5	85,25	86
22	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,55	0,55	0,6	0,58	0,66	0,69	0,71	0,60	0,60	0,70	0,76

Terima Kasih



KONDISI MAKRO

Indeks Pembangunan Manusia



TARGET KAB. MAGELANG 2021 : 70,25
CAPAIAN KAB. MAGELANG 2021 : 70,12
CAPAIAN JAWA TENGAH 2021 : 72,16
CAPAIAN NASIONAL 2021 : 72,29
TARGET Kab. Magelang tahun 2023 : 71,03

Capaian Komponen IPM 2021 :

Angka Harapan Hidup
73,88 Tahun
(2020: 73,72)



Harapan Lama Sekolah
12, 55 Tahun
(2020 : 12,54)



Rata-Rata Lama Sekolah
7, 79 Tahun
(2020 : 7,78)

Pengeluaran Perkapita
Disesuaikan
Rp. 9.440.000,-
(2020: 9.301.000,-)



IPM

2017

2018

2019

2020

2021

68,39

69,11

69,87

69,87

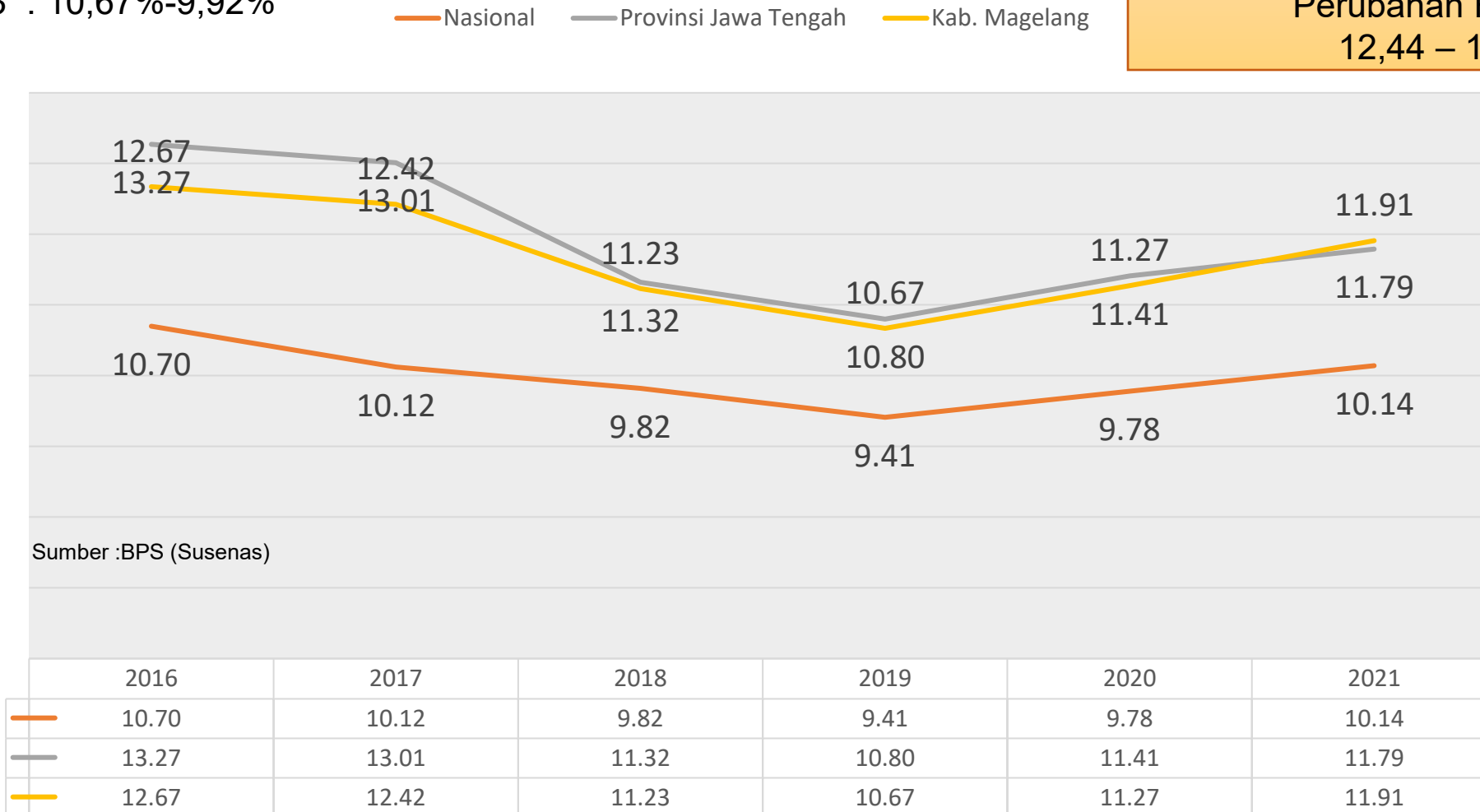
70,12

Angka Kemiskinan

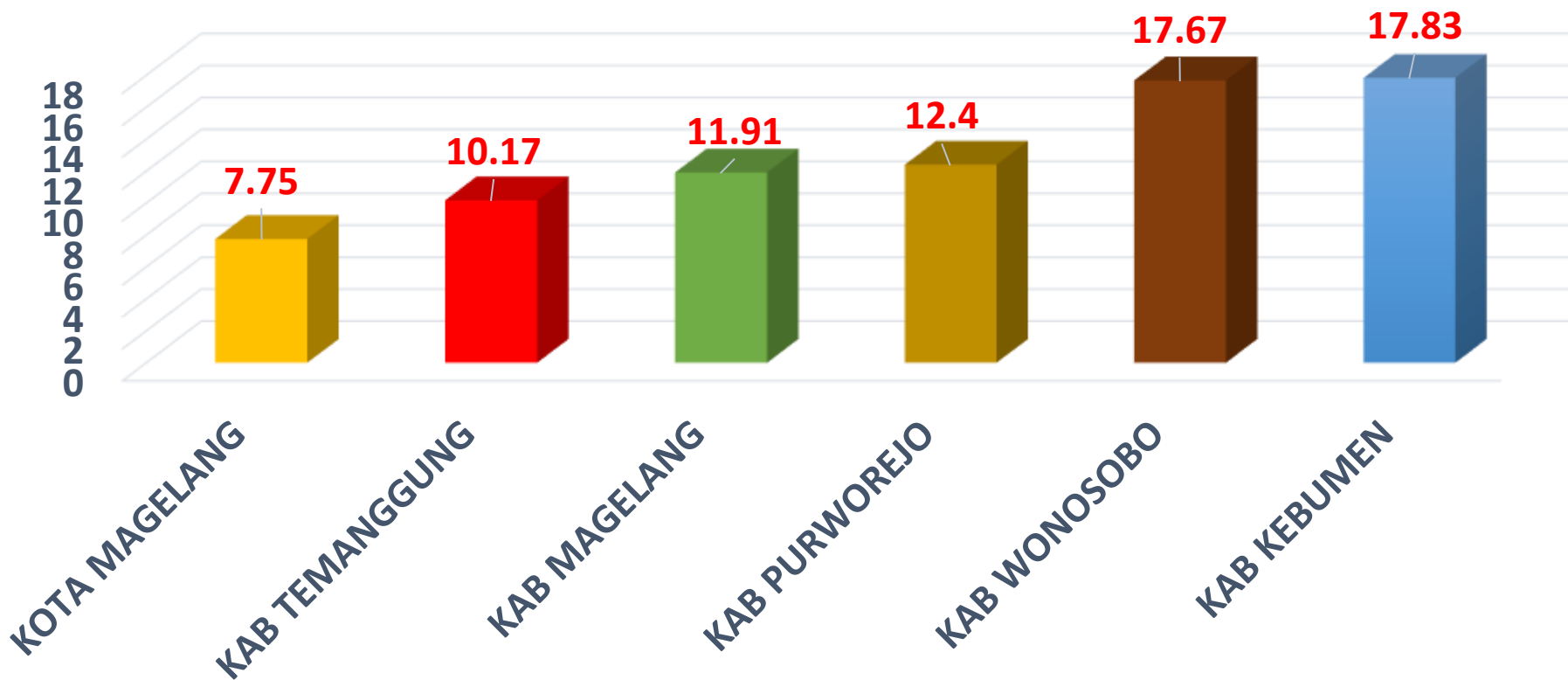
CAPAIAN 2021 : 11,91%
JAWA TENGAH : 11,79%
NASIONAL : 10,14%
TARGET 2023 : 10,67%-9,92%

Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) Kab. Magelang, Tahun 2016 - 2021

Range Angka Kemiskinan Tahun 2021
Perubahan RPJMD
12,44 – 11,52



PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN MAGELANG DENGAN KABUPATEN KOTA DI EKS KARESIDENAN KEDU TAHUN 2021



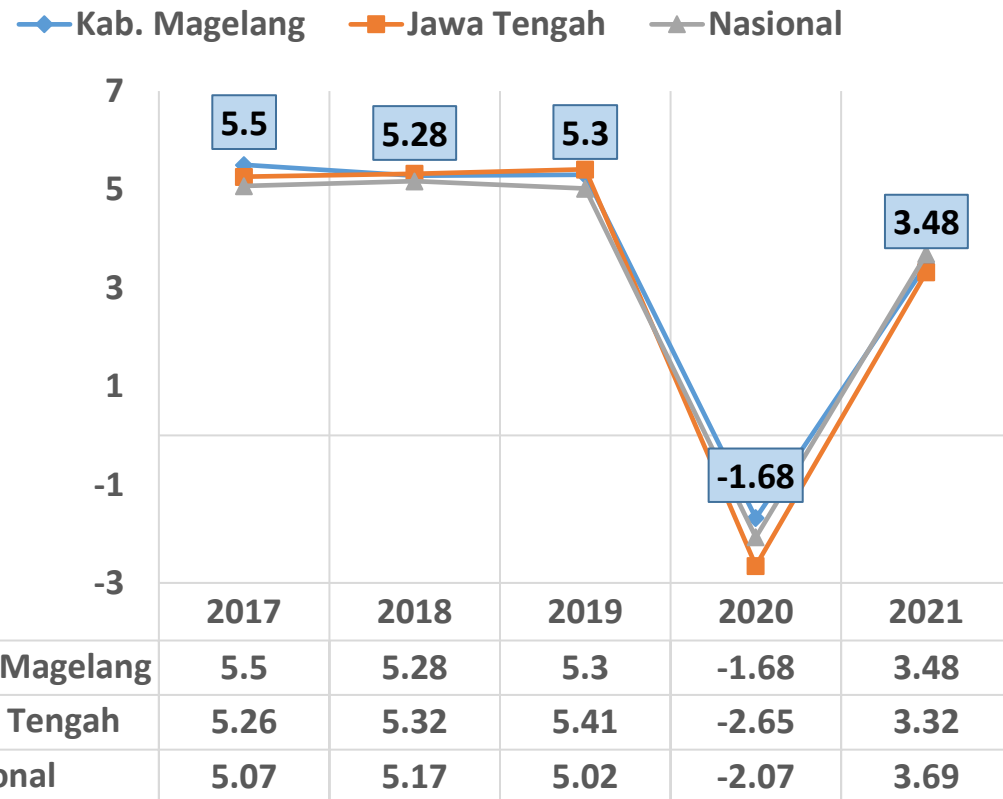
Dibandingkan dengan 6 Kabupaten/Kota di eks Karesidenan Kedu, Angka Kemiskinan Kabupaten Magelang berada pada posisi ke 3 berada di atas Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, namun berada dibawah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen

KONDISI MAKRO

Laju Pertumbuhan Ekonomi



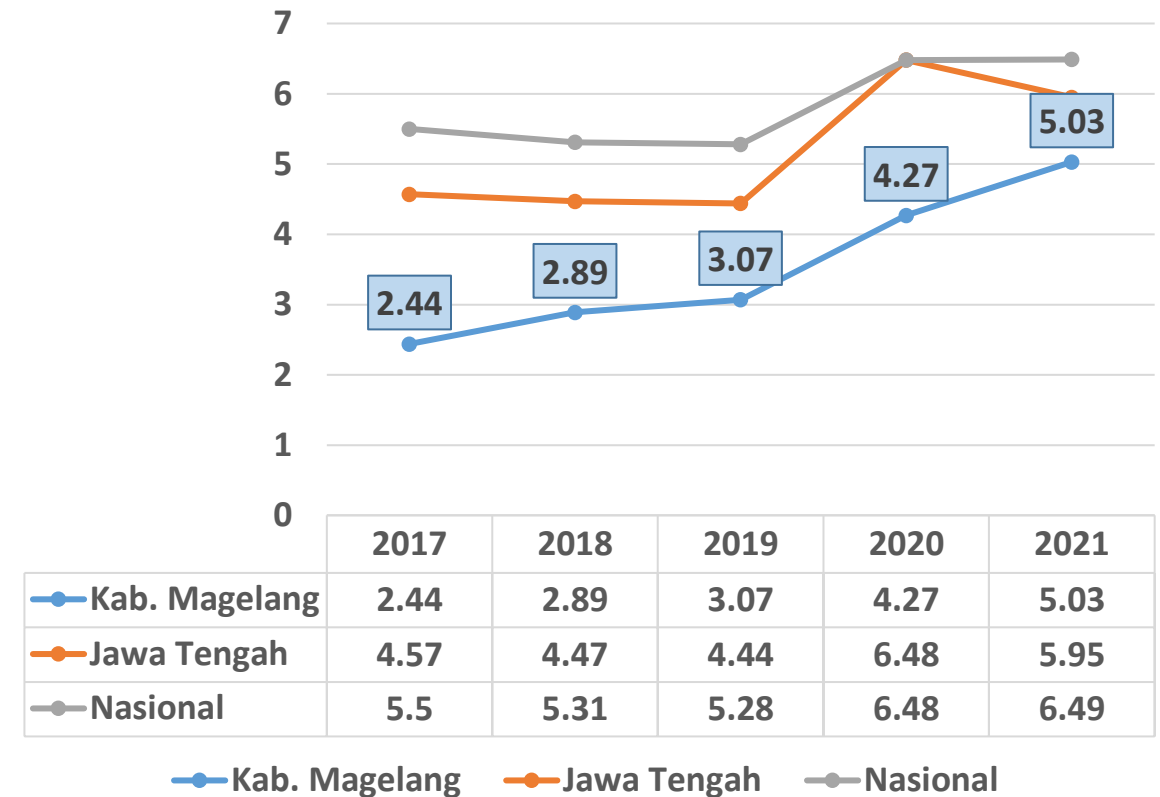
TARGET KAB. MAGELANG 2021 : 3,3-4,3
 CAPAIAN KAB. MAGELANG 2021 : 3,48
 CAPAIAN JAWA TENGAH 2021 : 3,32
 CAPAIAN NASIONAL 2021 : 3,69
 TARGET KAB. MAGELANG 2023 : 3,8 – 4,8



KONDISI MAKRO

Tingkat Pengangguran Terbuka

TARGET KAB. MAGELANG 2021 : 4,54-5,17
 CAPAIAN KAB. MAGELANG 2021 : 5,03%
 CAPAIAN JAWA TENGAH 2021 : 5,95%
 CAPAIAN NASIONAL 2021 : 6,49%
 TARGET KAB. MAGELANG 2023 : 2,4-3,0%



KONDISI MAKRO

INFLASI



TARGET KAB. MAGELANG 2021 : 2,0 – 4,0

CAPAIAN KAB. MAGELANG 2021 : 2,18 %

CAPAIAN JAWA TENGAH 2021 : 1,70%

CAPAIAN NASIONAL 2021 : 1,87%

TARGET 2023 : 2,0-4,0%

INFLASI

2017	2018	2019	2020	2021
3,47	2,66	2,12	1,90	2,18

